

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA BUKITTINGGI DI BADAN
KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015-2018**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

BERAKEL AGUNDA

2016/ 16233012

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA REALISASI
PENYERAPAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA BUKITINGGI DI
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITINGGI TAHUN 2015-2018

Nama : Berakel Agunda
BP / NIM : 2016 / 16233012
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2019

Diketahui Oleh :
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Diketahui Oleh :
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19240107 200912 2 003



Megawati, SE, MM
NIP. 19780610 200812 2 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA REALISASI
PENERIMAAN REtribusi TERMINAL KOFA BEKITTINGGI DI
BADAN KEUANGAN KOFA BEKITTINGGI TAHUN 2015/2018

Nama Benkel Agenda
NIM 16232012
Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Padang

Padang, November 2019

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------------|-----------|--|
| 1. | Megawati, SE, MM | (Ketua) |  |
| 2. | Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd. | (Anggota) |  |
| 3. | Rani Sofya, S.Pd, M.Pd. | (Anggota) |  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

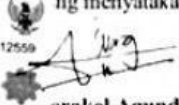
Nama : Berakel Agunda
NIM / TM : 16233012 / 2016
Tempat / Tanggal Lahir : Koto Baru Solok / 1 Februari 1998
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Banda Rabut Kel. Koto Baru Kabupaten Solok
Judul Tugas Akhir : **Faktor- Faktor Penyebab tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Bukittinggi di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah digunakan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya), baik itu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan orang lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis, atau yang diterbitkan orang lain kecuali acuan atau kutipan dengan mengutip tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Oktober 2019

ng menyatakan,

Berakel Agunda



ABSTRAK

**Berakel Agunda : Faktor- Faktor Penyebab tidak Tercapainya Realisasi
PenerimaanRetribusi Terminal Kota Bukittinggi di Badan
Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018**

Pembimbing : Megawati, S.E, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya realisasi retribusi Terminal di Dinas Badan KeuanganKota Bukittinggi pada tahun 2015-2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi retribusi terminal.. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang berasal dari Kota Bukittinggi di Universitas Negeri Padang dengan program studi DIII akuntansi, manajemen pajak, dan manajemen perdagangan. Untuk mengukur banyak sampel yang digunakan peneliti berdasarkan pertimbangan sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 30 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman retribusi terminal, mengenai pemahaman tentang retribusi terminal dan sarana. Dengan memperoleh rata-rata 3,21 dengan TCR sebesar 64,2% maka masyarakat selanjutnya diharapkan akan meningkatkan pengetahuannya akan retribusi terminal yang terkait, agar dapat meningkatkan kesadaran tersendiri akan kewajiban.

Kata Kunci: Faktor Tentang Asas Organisasi, Faktor Disiplin Kerja, Faktor Pengawasan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas kasih dan anugerah-Nya yang serta menyertai penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Faktor- Faktor Penyebab tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Bukittinggi di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018”. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Irwan dan ibunda Elfi Susanti, serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak.
6. Ibu Megawati, S.E, M.Mselaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, Adik-adik tersayang, dengan segala pengorbanannya yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril maupun materil, selalu memberikan semangat kepada penulis dan mereka juga motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Terimakasih untuk Astri Chairani yang telah memberikan semangat dan motivasi, selalu ada disaat penulis butuh dan selalu setia menemani penulis kemanapun untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Terimakasih kepada Teman teman pajak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa program studi Diploma III Manajemen Pajak tahun 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan kepada semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dalam analisis dan pembahasan. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri pribadi, almamater, lembaga dan orang banyak pada umumnya.

Padang, Oktober 2019

Berakel Agunda

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Pendapatan Asli Daerah | 9 |
| 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah | 9 |
| 2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah..... | 9 |
| B. Retribusi Daerah..... | 12 |
| 1. Pengertian Retribusi Daerah | 12 |
| 2. Ciri-ciri Retribusi Daerah..... | 12 |
| 3. Subjek Retribusi Daerah..... | 13 |
| 4. Objek Retribusi Daerah | 13 |
| 5. Bukan Objek Retribusi Daerah | 14 |
| 6. Jenis-Jenis Retribusi Daerah | 14 |
| 7. Pemungutan Retribusi Daerah..... | 18 |
| 8. Retribusi Terminal..... | 20 |
| 9. Objek Retribusi Terminal..... | 21 |
| 10. Subjek retribusi Terminal..... | 21 |
| 11. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Retribusi Terminal | 21 |

| | |
|---|----|
| 12. Kerangka Pikir | 24 |
| BAB III PENDEKATAN PENELITIAN | 26 |
| A. Bentuk Penelitian | 26 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 26 |
| C. Rancangan Penelitian | 26 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 26 |
| 2. Tahap Penelitian..... | 27 |
| 3. Objek Penelitian | 27 |
| 4. Sumber Data..... | 27 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 32 |
| A. Gambaran Umum Instansi..... | 32 |
| 1. Sejarah Singkat berdirinya Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi..... | 32 |
| 2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi..... | 33 |
| 3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi | 33 |
| 4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi..... | 37 |
| 5. Uraian <i>Job Description</i> | 37 |
| B. Hasil Penelitian | 42 |
| 1. Pemungutan Retribusi Terminal..... | 42 |
| C. Hambatan yang dialami oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam hal Pemungutan | 48 |
| D. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal..... | 49 |
| E. Kelemahan penelitian | 52 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 53 |
| A. Kesimpulan..... | 53 |
| B. Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 55 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018..... | 6 |
| Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | 35 |
| Tabel 4.2 Daftar Pegawai ASN Per Golongan dan Per Badan Keuangan Kota Bukittinggi..... | 36 |
| Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018..... | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Perhubungan Kota Bukittinggi | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari penerapan asas desentralisasi dengan penyerahan kewenangan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah. Penerapan dengan asas desentralisasi tersebut memberikan perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang diharapkan adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerah secara mandiri dan terarah. Kebijakan tersebut dititik beratkan pada daerah yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintah sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya. Sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses

penyelenggaraan otonomi daerah demi tercapainya pemerataan kapasitas daerah dari berbagai aspek.

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk merubah dan memperbaiki kondisi suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya, biaya tersebut salah satunya di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari pendapatan dan di dukung dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada Undang Undang Nomor33 Tahun 2004 itulah yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi bertambahnya wewenang pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat kemudian dialihkan kepada daerah. Salah satu contohnya adalah perubahan yang terjadi pada pengelolaan aset negara (Pemerintah) yang semula banyak ditangani oleh Pemerintah Pusat maka dengan otonomi daerah pemerintah daerah akan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan aset negara. Perubahan ini meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan negara yang dulu dikuasai / dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Sumber pembiayaan ini diperoleh berdasarkan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu penyumbang dalam pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi jasa khusus. Menurut Marihot (2016:622) Retribusi jasa umum terbagi dalam 14 bagian yaitu, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan/ penyedot kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi jasa usaha terbagi dalam 11 bagian yaitu, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penyebrangan di air, retribusi penjualan produk usaha daerah. Retribusi jasa khusus terbagi dalam 5 bagian yaitu, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Menurut Siahaan (2016:5) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi daerah memiliki peranan dan kontribusi untuk menunjang pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam memberikan pelayanan terminal. Retribusi terminal merupakan salah satu retribusi yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Secara umum, tujuan adanya terminal adalah untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Menurut marihot (2016:13) Pada dasarnya pemungutan retribusi terminal ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi retribusi. Retribusi terminal merupakan retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur

pemungutan retribusi terminal. Apabila pendapatan retribusi terminal semakin besar maka menunjukkan semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Kota Bukittinggi memiliki potensi cukup besar dalam penerimaan retribusi terminal. Hal ini dapat dilihat dari letak terminal yang strategis, karena terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten/kota.

Retribusi terminal memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi, karena setiap tahunnya pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi terminal tersebut. Target yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bukittinggi yang sudah ditetapkan mestinya bisa mencapai target tersebut semaksimal mungkin. Realisasi retribusi terminal dalam periode 2015-2018 menunjukkan tidak pernah mencapai target yang dianggarkan. Berikut adalah rincian penerimaan tahun anggaran 2015-2018 :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|-------|-------------|----------------|
| 1. | 2015 | 851.275.000 | 524.166.000 |
| 2. | 2016 | 851.275.000 | 550.447.000 |
| 3. | 2017 | 374.250.000 | 317.116.000 |
| 4. | 2018 | 979.275.000 | 225.326.000 |

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2018 realisasi retribusi terminal di Kota Bukittinggi tidak pernah memenuhi target. Ini terlihat pada tahun 2015 target yang ditentukan sebesar Rp 851.275.000 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 524.166.000. Pada tahun 2016 target yang ditentukan sebesar Rp. 851.275.000 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 550.447.000. Pada tahun 2017 target yang ditentukan sebesar Rp. 374.250.000 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 317.116.000. Dan terakhir pada tahun 2018 target yang ditentukan sebesar Rp. 979.275.000 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 225.326.000. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selain target dan realisasi berubah-ubah dari tahun 2015-2018 dan juga tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

Dalam menyikapi penurunan realisasi dalam tiga tahun terakhir serta tidak tercapainya terget penerimaan dalam beberapa tahun terakhir pada retribusi terminal maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi oleh pemerintah kota bukittinggi untuk menggali potensi pada retribusi terminal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menelaah dan menulis penelitian ini dengan judul **“Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya**

realisasi penerimaan retribusi terminal kota Bukittinggi di Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2015 – 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah untuk menjadi dasar dalam penyusunan Tugas Akhir yaitu apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Bukittinggi Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2015 - 2018?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan Retribusi Terminal Kota Bukittinggi Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2015 – 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian dan penyelesaian Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi, memberikan sumbangan masukan bagi pemerintah daerah. memberikan informasi dan gambaran bagi pihak-pihak yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Bukittinggi dalam rangka menangani dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan retribusi daerah khususnya retribusi terminal.

2. Bagi Penulis, Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang retribusi daerah khususnya retribusi terminal.
3. Bagi Ilmu Pengetahuan, yaitu sebagai bahan acuan/ referensi bagi yang berminat melakukan penelitian yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi terminal di Kota Bukittinggi belum optimal. Karena pengelolaan retribusi terminal dapat dikatakan optimal apabila target yang ditentukan sudah tercapai. Adapun hal-hal yang menjadi faktor penghambat tercapainya target yaitu :

1. Penetapan target yang terlalu tinggi
2. Masih kurangnya pemahaman tentang retribusi daerah yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di kota Bukittinggi
3. Kondisi sarana dan prasarananya yang kurang memadai.
4. Kurangnya kesadaran wajib retribusi,

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah

1. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pemungut dan objek retribusi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat dan objek retribusi jika membuat kesalahan. Kepada para tim pengawas atau koordinator yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, sebaiknya terjun langsung kelapangan untuk memantau dan meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam penerimaan retribusi terminal.

2. Perbaikan sarana dan prasarana. Perbaikan jalan menuju terminal regional harus diperbaiki secepatnya. Ini juga merupakan salah satu faktor penyebab tidak tercapainya retribusi terminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asis, 2013. *Optimalisasi pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng*
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pemungutan retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sumber-sumber PAD
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Objek retribusi
- Perda RI Nomor 66 Tahun 2001 yang mengatur tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Daerah